

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KELURAHAN LOA BAKUNG KOTA SAMARINDA

**Esen Hower Kristiansen Hanock<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda.*

*Jenis penelitaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Fokus penelitian yaitu Implementasi perda Administrasi Kependudukan meliputi Sosialisasi Disposisi atau Sikap implementator dan Struktur Birokrasi serta faktor penghambat implementasi perda administrasi kependudukan no.14 tahun 2009 di kantor kelurahan loa bakung. Teknik pengumpulan data meliputi 3 tahapan yaitu getting in, getting along, dan logging the data. Teknik analisis data meliputi 3 tahapan yaitu Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi*

*Hasil penelitian menunjukkan adanya miskomunikasi dalam proses sosialisasi kepada ketua RT dikarenakan tingkat partipasi atau kehadiran dari pihak ketua RT yang rendah, tingkat komitmen yang tinggi telah melekat pada para petugas namun masih ditemukan beberapa oknum yang tidak pada tempatnya saat jam kerja, struktur birokrasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada dan sesuai tugas pokok dan kewenangannya masing-masing. Sarana dan prasarana perlu diperbaiki dan ditambah lagi gun menunjang proses pelayanan yang maksimal, serta penambahan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan memiliki tingkat pendidikan yang baik*

***Kata Kunci:*** *implementasi Kebijakan, peraturan daerah, Administrasi Kependudukan.*

## **PENDAHULUAN**

### ***Latar Belakang Masalah***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: iamcenz08@gmail.com

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan merupakan salah satu negara berkembang, untuk mengisi kemerdekaannya harus melaksanakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan demi mewujudkannya kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, faktor kependudukan merupakan salah satu masalah penting dan menentukan yang harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius oleh pemerintah.

Pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan, dan statistik peristiwa kependudukan merupakan dukungan terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi. Persoalannya adalah bagaimana dalam menghadapi tantangan global untuk mendukung berbagai kegiatan tertib administrasi kependudukan serta adanya tuntutan data yang akurat didukung oleh proses pelayanan yang tepat dan cepat saat ini telah menjadi suatu kebutuhan. Mengingat laju pertumbuhan penduduk kota samarinda yang relatif tinggi, yakni sekitar 3.5 s/d 4 % setiap tahun melebihi laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional yang hanya 1,9 s/d 2,3 % dan dengan jumlah penduduk kota Samarinda kurang lebih sekitar 609.380 jiwa pada tahun 2012 (Sumber BPS Kota Samarinda). Ditambah lagi dengan persebaran yang tidak merata dan terkonsentrasi di pusat-pusat perekonomian akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatannya cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh kemudahan fasilitas pelayanan lainnya, sebagai alternatif bermukim. Oleh sebab itu segala bentuk pengelolaan dan penyelenggaraan penyajian data mengenai kependudukan tersebut sangatlah penting keberadaannya, mengingat kita sebagai warga negara yang baik dan tertib hukum harus mengingat peraturan yang telah ditetapkan, dan manfaat yang paling dirasakan apabila kita menaati apa yang telah ditetapkan dalam hal tertib administrasi kependudukan yaitu sebagai warga negara indonesia selain dilegalkan keberadaannya juga dilindungi hukum dimanapun kita berada.

Berdasarkan penjelasan umum Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan bahwa; "Administrasi Kependudukan adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pencatatan / pendaftaran penduduk dan pengelolaan pemberian identitas dalam rangka pengendalian penduduk yang berdaya guna dan berhasil guna." Dengan demikian maka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda No 14 tahun 2009 perlu dilaksanakan dan

dipertanggung jawabkan karena administrasi kependudukan dalam pemerintahan sangatlah diperlukan.

Di bidang kependudukan, persoalan yang menjadi tantangan bagi Kelurahan Loa Bakung pada saat ini ialah belum terlaksananya administrasi kependudukan secara maksimal, terutama pada bidang penataan dan penerbitan

Dokumen Kependudukan yaitu melalui pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh Kelurahan Loa bakung, hal ini ditemukan masih adanya masyarakat yang tidak mempunyai Surat Keterangan Pindah Penduduk dan Identitas yang jelas, seperti masih memiliki dua KTP/KK dan alamat yang tidak jelas, sehingga pendaftaran dan pendataan kependudukan di Kantor Kelurahan Loa Bakung saat ini masih kurang maksimal.

Maka dari itu, Kelurahan Loa Bakung sangat perlu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam hal Sosialisasi Perda Kota Samarinda, Disposisi atau Sikap Petugas Kelurahan, dan Struktur Birokrasi dalam menanggulangi pendaftaran dan pendataan penduduk, sehingga tercipta pemerintahan yang tertib dan mampu menyediakan *public good* dan *services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Kelurahan Loa Bakung. Dalam hal tersebut, perlu sistem administrasi kependudukan yang jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan bertanggung jawab serta tertib administrasi.

Dengan melihat uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul **“implementasi Perda Kota Samarinda No.14 Tahun 2009 tentang administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda”**.

### ***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana implementasi administrasi kependudukan di kantor kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda?

### ***Tujuan penelitian***

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda.

### ***Manfaat Penelitian***

1. Manfaat teoritis :

- a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai administrasi kependudukan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis :
- a. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi Kantor Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda dalam bidang administrasi kependudukan.
  - b. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Pengertian Kebijakan Publik***

Menurut Dunn (dalam Pasolong 2007:39) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

### ***Pengertian Implementasi***

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab 2008 : 68) menjelaskan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

### ***Syarat Implementasi Kebijakan***

Agar kebijakan dapat terimplementasi dengan sempurna maka diperlukan syarat-syarat tertentu seperti yang dikemukakan oleh Hoogwod dan Gunn (dalam Wahab, 2008:70-78) : Kondisi *eksternal* (sikap masyarakat) yang dihadapi oleh pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala serius, Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai, Perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia dan sebagainya

### ***Administrasi***

Menurut Nawawi (1999:15) “Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.”

### ***Kependudukan***

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 14 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 1 bahwa “ Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah kota Samarinda secara berturut-turut selama 180 ( seratus delapan puluh ) hari dan telah memenuhi syarat - syarat yang ditetapkan oleh kepala daerah.”

### ***Administrasi Kependudukan***

Berdasarkan penjelasan umum Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan bahwa ; “Administrasi Kependudukan adalah serangkaian usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan pencatatan / pendaftaran penduduk dan pengelolaan pemberian identitas dalam rangka pengendalian penduduk yang berdaya guna dan berhasil guna.

### ***Definisi Konsepsional***

Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Loa Bakung adalah pelaksanaan suatu produk Pemerintah Kota Samarinda berupa Peraturan Daerah yang mengatur seluruh mekanisme Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Samarinda, khususnya di Kantor Kelurahan Loa bakung.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, menurut Moleong (2005:90) penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara menyeluruh.

### ***Fokus Penelitian***

1. Implementasi Administrasi Kependudukan yaitu meliputi :
  - a) Sosialisasi
  - b) Disposisi atau Sikap implementator
  - c) Struktur Birokrasi
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Administrasi Kependudukan di Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda.

### ***Sumber Dan Jenis Data***

1. Sumber Data Primer
  - a. *Key informan* adalah Lurah sebagai pimpinan dalam meningkatkan kinerja pegawai.
  - b. Informan yaitu Kepala Bidang tata pemerintahan dan pegawai kelurahan yang dilakukan secara *purposive sampling*
  - c. Informan Lain pada penelitian ini yaitu masyarakat.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

### ***Tehnik Pengumpulan Data***

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), artinya penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan teori dan data dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini, yang dipergunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu observasi, wawancara (*interview*), dan penelitian dokumen atau dokumen *research*.

#### ***Tehnik Analisis Data***

Untuk menganalisa data kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014 : 33), analisa data kualitatif terdiri dari 3 komponen, antara lain:

1. Kondensasi Data
2. Penyajian data.
3. Penarikan kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***Pembahasan***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Peraturan daerah kota samarinda no. 14 tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda, maka hasil pembahasannya yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **Implementasi Perda Kota Samarinda No. 14 Tahun 2009 di Kantor Kelurahan Loa Bakung**

##### **1. Sosialisasi**

**Transmisi** : Keberhasilan dari suatu implementasi dapat dilihat dari adanya informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran dengan begitu informasi dari aparatur dapat sampai dengan baik kepada seluruh masyarakat. Penyampaian informasi terkadang tidak selalu berjalan dengan baik karena dalam penyampaian informasi yaitu adanya salah pengertian atau kesalahpahaman.

Proses sosialisasi yang dijalankan aparat dilakukan secara lisan dilakukan oleh pemerintah kota khususnya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Samarinda, Kecamatan Sei Kunjang, dan Kelurahan Loa Bakung. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bagaimana proses dan prosedurnya untuk memudahkan proses pelayanan baik dari pihak aparat maupun terutama untuk masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya miskomunikasi antara Kelurahan, Ketua RT, dan Warga, menyebabkan kurangnya pemahaman warga akan penyelenggaraan administrasi. Karena dalam proses transmisi masih banyak Ketua RT sebagai perwakilan warga dan ujung tombak Kelurahan dalam menyampaikan sosialisasi ini tidak dapat

menghadiri sosialisasi Perda Kota Samarinda No. 14 Tahun 2009, begitu juga bagi Ketua RT yang menghadiri terkendala untuk mengumpulkan warga untuk kemudian melanjutkan sosialisasi di lingkungannya masing - masing.

**Kejelasan Informasi :** Dalam hal kejelasan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Samarinda telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No 14 Tahun 2009 yang menyesuaikan Undang-undang RI No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan untuk melaksanakan pencatatan / pendaftaran penduduk dan pengelolaan pemberian identitas dalam rangka pengendalian penduduk yang berdaya guna dan berhasil guna. Namun dikarenakan pada dimensi sebelumnya yaitu transmisi yang tidak tersalurkan dengan baik dari pihak Ketua RT pada warganya maka seringkali warga yang berada di kelurahan dibuat bingung dalam proses pengurusan administrasi dan perlu diberi penjelasan informasi lagi.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, masih kurangnya jelasnya informasi mengenai perda tersebut menyebabkan banyak warga kebingungan dan tidak paham ketika melakukan pengurusan administrasi. Tidak mengherankan masyarakat/warga selalu dibingungkan contohnya ketika mengurus Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan lain sebagainya karena persyaratan selalu tidak di urus secara tuntas karena kurangnya pemahaman warga akan proses dan prosedur pengurusannya. Hal ini terjadi karena proses transmisi sebelumnya tidak tersalurkan dengan baik.

**Konsistensi Informasi :** Konsistensi dalam penyampaian informasi harus dimiliki oleh setiap implementator. Untuk implementasi Perda Kota Samarinda No 14 tahun 2009 di kelurahan Loa Bakung sudah melakukan konsistensi informasi yang baik. Pihak dinas, kecamatan, dan kelurahan telah memiliki kesepakatan bersama untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, Selama ini, pelaksanaan sosialisasi penyampaian Perda Kota Samarinda No. 14 Tahun 2009 tidak berjalan dengan baik karena tidak ada komunikasi yang cukup baik dan konsisten antara aparat pemerintah sebagai komunikator dan masyarakat/warga sebagai komunikan. Sehingga tujuan tertib administrasi yang terkandung dalam Perda Kota Samarinda No.14 Tahun 2009 tidak tercapai.

## **2. Disposisi**

Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana merupakan faktor ketiga dalam implementasi kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Edwards dalam Budi Winarno (2002: 143), terkait disposisi implementor, ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana

Dari hasil observasi penulis dan wawancara dengan informan lain yaitu masyarakat menunjukkan bahwa hampir semua petugas menjalankan tupoksinya

masing-masing. Namun masih ditemukan pegawai yang kurang berkomitmen karena tidak ada pada tempatnya ketika jam pelayanan telah di buka dengan berbagai alasan. Seperti terlambat masuk karena mengantarkan anak sekolah maupun hanya sekedar absen kemudian beralasan membeli makan siang, dan juga pergi minum kopi di warung kopi di sebelah kelurahan.

Para staf/pegawai yang berwenang kurang memiliki kedisiplinan karena banyak yang datang tidak tepat waktu pada jam kerja dan acuh tak acuh pada tugas dan kewajibannya. Keterlambatan dan Keacuhan ini merupakan suatu bentuk ketidaksiplinan yang akan menjadi penghambat dalam pelayanan administrasi dan berimbas pada Implementasi Perda Kota Samarinda No 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hal ini akan menjadi penting dalam sebuah Instansi pemerintah apalagi yang langsung berhubungan dengan masyarakat karena dapat membuat persepsi masyarakat menjadi tidak baik terhadap kinerja dari pegawai/staf tersebut.

### **3. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan. Edwards menjelaskan salah satu aspek-aspek struktural paling mendasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standart Operating Procedures/SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas (Budi Winarno, 2002: 151). Dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi organisasi yang mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*) yang menjadi pedoman bagi implementor di dalam bertindak.

Struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi Perda Kota Samarinda No 14 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan Kelurahan Loa Bakung untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

Dari hasil wawancara dan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, Struktur birokrasi yang sudah ada di kantor Kelurahan Loa Bakung sudah bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya, mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan. Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan, kalau pun ada yang melakukan tugas yang lain hal tersebut sudah ada penjelasan terlebih dahulu. Struktur birokrasi di Kantor Kelurahan Loa Bakung melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maksudnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Mereka tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan



bagian kinerjanya, apabila mereka melanggar maka mendapat sanksi tegas. Hal tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, sehingga tidak ada satu pelaksana kebijakan melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan implementasi Perda Kota Samarinda No 14 Tahun 2009 tentang administrasi kependudukan di kantor Kelurahan Loa Bakung.

### **Faktor penghambat implementasi perda kota samarinda tentang administrasi kependudukan**

Suatu badan atau institusi pada dasarnya tidak pernah terlepas dari berbagai faktor dan hambatan. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, faktor penghambat yang dihadapi adalah sebagai berikut

#### **A. Sarana dan Prasarana**

Ada beberapa faktor penghambat bagi kantor Kelurahan Loa Bakung dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi pelayanan. Dimana penulis mendapat data dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

Dari hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di kantor Kelurahan Loa Bakung masih minim, seperti kurangnya Komputer dan Printer dalam proses pengurusan administrasi serta Genset untuk mengantisipasi pelayanan ketika aliran listrik padam. Berikut data - data mengenai perangkat teknologi informasi yang berada di Kelurahan Loa Bakung.

Dengan minimnya sarana dan prasarana di Kantor Kelurahan menyebabkan pegawai kesulitan untuk tepat waktu dalam memberikan pelayanan yang efisien dan optimal kepada masyarakat.

#### **B. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Tugas dan Fungsi pelayanan di kantor Kelurahan Loa Bakung masih terkendala dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai lembaga yang mengurus berbagai pelayanan, kantor Kelurahan Loa Bakung tentu harus memiliki pegawai yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Selain masalah kekurangan tenaga kerja dalam menangani semua urusan pelayanan yang ada, kantor Kelurahan Loa Bakung juga terkendala dengan masalah disiplin beberapa oknum pegawai yang masih rendah.

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa kantor Kelurahan Loa Bakung membutuhkan lebih banyak pegawai terutama yang memiliki tingkat pendidikan sarjana karena sebagian besar pegawai yang ada hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini juga sesuai berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa sebagian besar pegawai belum menyandang gelar sarjana. Selain itu, tingkat disiplin beberapa oknum pegawai yang masih rendah dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Kelurahan Loa Bakung menjadi faktor penghambat kinerja pegawai.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan mengenai “Implementasi PERDA Kota Samarinda No.14 tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kelurahan Loa Bakung” telah peneliti jabarkan di atas, setelah peneliti analisis dengan teori yang ada, dapat ditarik beberapa simpulan yaitu:

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi memiliki tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Ketiganya sudah dijalankan dengan baik. Hanya saja kurangnya partisipasi dari para Ketua RT yang diharapkan dapat mewakili warga secara menyeluruh, menyebabkan informasi mengenai PERDA tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik dan jelas.

#### 2. Disposisi

Dari hasil penelitian dan wawancara dapat dilihat bahwa para petugas/pegawai sudah memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Namun masih ada masalah pada sikap oknum petugas kelurahan. Masih ada beberapa petugas/pegawai Kelurahan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik karena sering meninggalkan tempat pada saat jam kerja.

#### 3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Implementasi sudah memiliki SOP dan sudah dilaksanakan sesuai SOP. Struktur organisasinya pun tidak berbelit-belit,

#### 4. Faktor Penghambat

Hambatan atau kendala dalam implementasi PERDA No. 14 tahun 2009 pada Kantor Kelurahan Loa Bakung adalah Kurangnya sarana dan prasarana berupa Komputer dan Printer yang berfungsi dengan baik, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana yang berkompeten dalam proses administrasi publik, serta Kurang disiplinnya oknum petugas yang meninggalkan tempat dan pekerjaannya pada saat jam kerja

### ***Saran***

Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung proses administrasi di Kelurahan Loa Bakung, berupa Komputer, Printer, dan Genset guna memaksimalkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Karena komputer dan printer merupakan alat penunjang utama guna menyimpan *database* dan melakukan proses administrasi. Sedangkan Genset berguna untuk menjaga proses administrasi tidak terhenti dan tetap optimal ketika listrik padam. Peningkatan mutu petugas yang memiliki tingkat edukasi tinggi dan bergelar sarjana wajib dilaksanakan karena akan berpengaruh besar pada hasil di lapangan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa hanya 4 orang saja yang memiliki gelar sarjana. Kondisi ini perlu diberi perhatian khusus karena

administrasi publik memerlukan orang - orang yang berkompeten di bidangnya guna menghasilkan “*good governance*” dan pelayanan prima. Dalam menghadapi kurang disiplinnya oknum - oknum petugas/pegawai, perlu adanya pemberian *punishment* atau sanksi yang tegas dan jelas agar memberi efek jera bagi para oknum tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan serta menjaga kedisiplinan petugas/pegawai secara keseluruhan. Sehingga tidak ada petugas/pegawai yang meninggalkan tempat dan pekerjaannya ketika jam kerja dan proses administrasi tengah berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku :**

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Barnard, I, Chester. 1992. *Organisasi dan manajemen, Struktur, Perilaku dan Proses*. Jakarta : Gramedia
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik ( Edisi Kedua, Cetakan Kelima)*. Gadjra Mada University : Yogyakarta.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs
- E, Utrecht. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hasibuan, SP. 2003. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Milles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Milles, Mattew B., A. Michael Huberman., dan Saldana, Johny. 2014. *Qualitative Data Analysis ( Third Edition )*. SAGE Publications, Inc. Los Angeles
- Moleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Mufiz, Ali. 2004. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasih.
- Mustopadidjaja. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Naihasy, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik : Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta : Mida Pustaka.
- Nawawi, Hadari, 2005. *Metode penelitian Sosial*, Ugin Press, Djogjakarta.

- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya; Pustaka Pelajar
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Simbolon, Maringan Masri. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisi Kebijakan Publik Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudibyo, Langgeng. 2009. *Sarana dan Prasarana*. Jakarta : Rajawali Persada.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Syaukani, H, dkk. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik)*. Bayumedia Publishing : Malang.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Media Pressindo : Yogyakarta.

### **Dokumen - Dokumen**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 *tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera*
- Undang - undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 *tentang administrasi Kependudukan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 *tentang Kelurahan*
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 14 Tahun 2009 *tentang administrasi kependudukan*
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 10 tahun 2009 *tentang kelurahan kota samarinda*
- Profil Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda

### **Website.**

- <http://Samarindakota.bps.go.id>. Statistik Daerah Kota Samarinda 2012
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan>
- <http://kertyawitaradya.wordpress.com/03-07-2012/19:18>)